

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan e-budgeting dalam mengurangi penyelewengan anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode wawancara. Analisis dilakukan terhadap data jumlah penyelewengan anggaran tahun 2015 dan 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-budgeting efektif dalam mengurangi penyelewengan anggaran. Hal ini diketahui dari hasil penelitian pada penganggaran tahun 2015, saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan e-budgeting secara menyeluruh dan masih menggunakan dua sistem yaitu SIP dan e-budgeting. Saat itu, ditemukan penyelewengan anggaran sebesar 23%. Akan tetapi, pada tahun 2016, setelah e-budgeting diterapkan secara menyeluruh tidak ada penyelewengan anggaran yang masuk. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi keefektifan e-budgeting dalam mengurangi penyelewengan anggaran yaitu penggunaan komponen, keterbukaan informasi serta kebijakan dan ketegasan pimpinan. Dengan penggunaan komponen yang merupakan standar satuan harga berlaku untuk seluruh unit kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka pengusulan anggaran tidak berdasarkan perkiraan melainkan sesuai dengan kebutuhan riil. Keterbukaan informasi yang diterapkan dalam e-budgeting membuat masyarakat dapat ikut mengawasi sehingga mengurangi kemungkinan pihak-pihak tertentu melakukan penyelewengan anggaran. Kebijakan dan ketegasan pimpinan dalam penerapan e-budgeting membuat batasan dalam penggunaan sistem e-budgeting untuk pengusulan anggaran, sehingga dapat mengurangi penyelewengan anggaran.

Kata Kunci: e-budgeting, penyelewengan anggaran

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of e-budgeting in reducing budget fraud in Jakarta Capital City Government. This research is qualitative using interviews. The analysis conducted on the number of budget fraud in 2015 and 2016.

The results showed that e-budgeting to be effective in reducing the budget fraud. It is known from research on budgeting in 2015 when the Government of Jakarta have yet to implement e-budgeting thoroughly and still use the two systems are SIP and e-budgeting discovered fraud budget by 23%. However, in 2016 after the e-budgeting fully implemented no incoming budget fraud. Supporting factors that influence the effectiveness of e-budgeting in reducing budget fraud is the use of components, as well as the information disclosure policy leadership and decisiveness. With the use of components which is a standard unit prices apply to all work units in Jakarta Capital City Government, the budget proposal is not based on an estimate, but according to real needs. Disclosure of information applied in e-budgeting allows the community to participate in supervising reducing certain parties do budget fraud. Policy leadership and decisiveness in the implementation of e-budgeting make restrictions in the use of e-budgeting system's budget proposal so as to reduce budget fraud.

Keywords: e-budgeting, budget fraud, government